

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kemiskinan menjadi masalah penting saat ini sehingga menjadi satu fokus perhatian bagi pemerintah Indonesia, masalah kemiskinan ini sangat kompleks dan bersifat multidimensional, yang berkaitan dengan seluruh aspek sosial, ekonomi dan budaya serta aspek lainnya. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) NTT, Propinsi NTT merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia tergolong sebagai provinsi sangat miskin. Realita ini tentu saja membuat NTT ingin mengikuti jejak provinsi lain menuju provinsi yang lebih baik dan maju. Ekspektasi atau harapan ini menjadi keinginan dari seluruh komponen yang ada di NTT termasuk pemerintah dan masyarakat. Ekspektasi yang begitu besar dan mulia ini dijalankan dan diwujudkan melalui pelaksanaan tugas dengan penuh kepercayaan dan tanggung jawab dari seluruh stakeholder yang ada. Sebagai pemerintah yang menjalankan tugas dan amanah masyarakat tentu saja ada begitu banyak hal yang ingin dilakukan untuk mewujudkan NTT yang lebih baik dan maju diberbagai aspek kehidupan, misalkan dengan membuat kebijakan yang pro masyarakat dengan tetap menjaga transparansi dan Akuntabilitas serta memberikan pelayanan public yang baik sehingga membuat masyarakat menjadi puas dan nyaman¹.

Harapan menuju NTT yang lebih baik dan maju bukanlah hal yang mudah kalau NTT masih dibelenggu oleh berbagai problematika kehidupan. Banyak lembaga menurunkan data tentang kemiskinan di Indonesia. Hasilnya NTT berada di posisi ketiga dari bawah, hanya berada satu tingkat diatas propinsi Papua barat dan Propinsi Papua.

¹ Prijono, *Program Pemberdayaan masyarakat Mandiri*. Refika Aditama, Bandung

Pos Kupang (4 Januari 2018) melaporkan bahwa jumlah penduduk miskin di NTT selama dua tahun makin bertambah. Jika tahun sebelumnya 2016 jumlah penduduk miskin berjumlah 1.150.080 dari 5,2 juta penduduk berada di urutan keempat propinsi dengan penduduk termiskin, dan tahun kemudian pada tahun 2017 angka itu bertambah dan menempatkan NTT di posisi ketiga dengan rata-rata kemiskinan mencapai 22,64% atau bertambah menjadi 1.170.780 orang penduduk miskin². Persoalan kemiskinan juga menjadi persoalan serius bagi Kabupaten Malaka. Sebagai salah satu kabupaten yang baru dimekarkan dari kabupaten Belu dikategorikan sebagai salah satu kabupaten yang miskin. Dari Total 426.670 penduduk Kabupaten Malaka sebanyak 69.560 dikategorikan sangat miskin dimana hampir 85% atau 59.126 orang penduduk miskin berada pada daerah Pedesaan³.

Menurut Stphenson dan Mascia⁴ masalah kemiskinan ini berkaitan dengan masalah sosial kemasyarakatan yang salah satu indikatornya adalah kesejahteraan ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar dan akses terhadap berbagai potensi sumber daya yang ada. Terbelakangnya daerah pedesaan dinegeri ini masih merupakan masalah terbesar yang belum teratasi, masih terdapat banyak desa yang sangat timpang keadaanya dibandingkan dengan kota, oleh sebab itu arah kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunannya yaitu menciptakan pemerataan pertumbuhan ekonomi termasuk kemandirian sosial dan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan potensi wilayah secara optimal dan mendorong usaha-usaha untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya yang ada.

² Gregor Neonbasu, *Citra Pembangunan Desa*. Desa Sejahtera Negara Kuat, 2019

³ Kabupaten Malaka Dalam Angka, 2018

⁴ Sthepeson S.L and M.B Mascia (2009) *Putting people on the map*. Sosial Science working Group Washinton DC

Pembangunan ekonomi saat ini merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh suatu daerah. Hal tersebut selalu menjadi bagian dari program pemerintah setiap tahun dalam meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan rakyat, serta taraf hidup. Untuk mencapai tujuan tersebut perencanaan pembangunan haruslah fokus terhadap potensi yang dapat menunjang perekonomian dilihat dari sumber daya masing-masing daerah. Salah satu indikator untuk melihat kesejahteraan masyarakat dari aspek materi yaitu melalui tingkat pertumbuhan ekonomi⁵. Pembangunan desa dapat ditingkatkan melalui pengembangan potensi perekonomian. Dalam undang-undang desa, pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan realitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui penyediaan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana dan pengembangan potensi ekonomi lokal.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut pemerintah harus kreatif menciptakan sebuah usaha yang secara sehat yang mampu mendukung perekonomian baik dengan meningkatkan kesejahteraan anggota serta masyarakat disekitarnya maupun turut berpartisipasi dalam membangun system perekonomian yang salah satunya adalah BUMDes.

BUMDes adalah sebuah program yang dirancang oleh pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik dengan cara melibatkan masyarakat yang secara umum kegiatannya adalah menampung kegiatan masyarakat dalam bidang ekonomi kedalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional namun tetap berdasarkan potensi asli desa melalui kemampuan dan kewenangan desa.⁶

⁵ Sedarmayanti, *Perencanaan Pembangunan perspektif Pedesaan*. Jakarta Ekpress, 2004

⁶ Suryadi, *Strategi Pembangunan desa dalam meningtkn pendapatan masyrakat* Jakarta UI-Press, 2009

BUMDes dapat menjadi poros kehidupan masyarakat yang tujuannya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, mampu menyerap kapasitas produksi masyarakat dan aksesnya terbuka untuk semua masyarakat desa. Berdirinya BUMDes memiliki tujuan sebagai agen pembangunan daerah dan menjadi pendorong terciptanya sektor ekonomi yang handal, berdirinya lembaga ini tidak lagi berdasarkan atas instruksi pemerintah namun harus berdasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berawal dari potensi yang ada. Bentuk kelembangaan ini sesuai dengan yang diamanatkan UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa sebagaimana yang telah ditegaskan bahwa desa dapat mendirikan badan usaha milik desa yang disebut BUMDes. dalam pendirian sebuah badan usaha tersebut harus disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah yang memfasilitasi dan melindungi usaha ini dari ancaman persaingan para pemodal besar. BUMDes secara melembaga di tingkat desa diharapkan akan mendinamisasi segala potensi desa untuk kesejahteraan masyarakatnya. BUMDes diharapkan dapat menstimulus masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dan mensejahterakan masyarakat karena BUMDes dapat menjadi wadah bagi pemerintah desa untuk memberdayakan dan memanfaatkan sumber potensi yang ada⁷. Bentuk BUMDes dengan demikian dapat bervariasi di setiap desa, bentuk yang beragam ini dapat berbeda disesuaikan dengan keadaan dan kondisi masing – masing desa yang memiliki karakteristik lokal, potensi dan sumber daya yang berbeda. Ruang usahanya bisa dilakukan pada bidang ekonomi, jasa dan atau pelayanan umum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. yang dimana pengaturan lebih lanjut diatur melalui Peraturan Desa lewat kesepakatan bersama masyarakat dan pemerintah desa.

⁷ Undang-undang Nomor 6 tahun 2004 tentang Desa

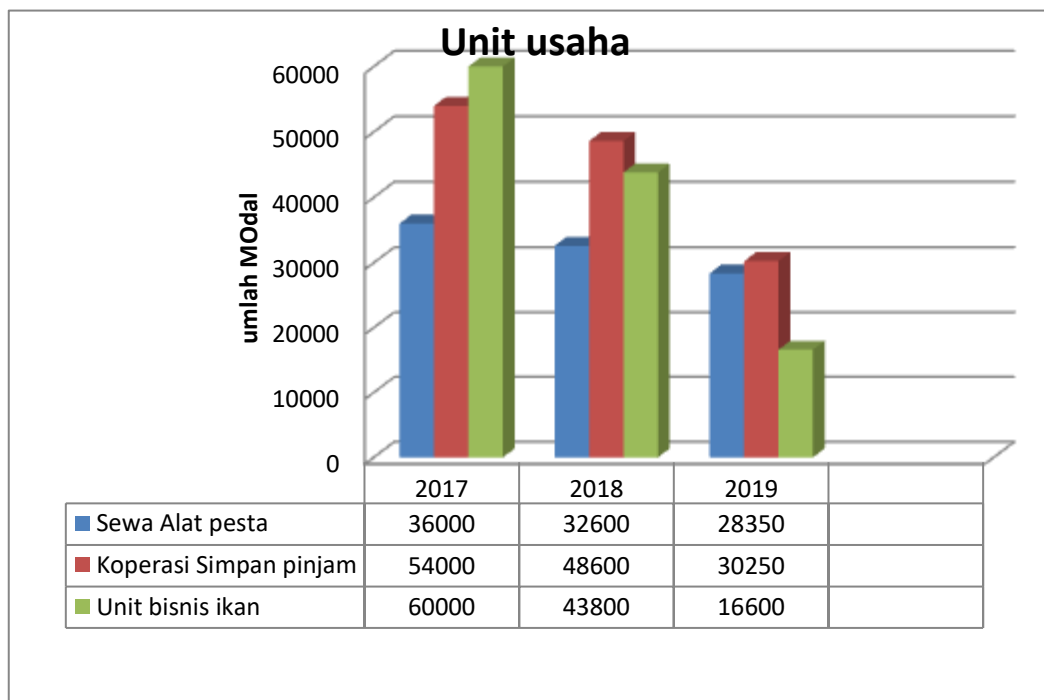
BUMDes Wehali adalah badan usaha yang dibentuk oleh masyarakat dan Pemerintah Desa Forekmodok Kecamatan Weliman berdasarkan pada Peraturan Desa nomor 4 tahun 2017. Pembentukan Badan usaha milik desa ini bertujuan untuk membentuk sebuah lembaga perekonomian yang mandiri, tangguh dan meningkatkan Sumber Pendapatan Asli daerah melalui keuntungan lewat usaha-usaha desa, adapun sumber modal BUMDes yaitu bantuan Pemerintah. Pada awal berdirinya perkembangan BUMDes ini berjalan baik. Jumlah unit usaha yang dijalankan saat ini sudah cukup banyak dan bervariasi, *pertama* unit usaha persewaan peralatan pesta, berupa penyediaan Kursi dan tenda. *Kedua* koperasi simpan pinjam, dengan memberikan pinjaman bergulir kepada masyarakat yang membutuhkan modal atau mengembangkan usaha dengan bunga yang kecil. *Ketiga* Unit bisnis ikan dan kapal motor, usaha ini dikelola oleh BUMDes dengan tenaga kerja berasal dari masyarakat sekitarnya dan hasilnya menjadi salah satu sumber pendapatan bagi desa.

Berdasarkan hasil pengamatan awal peneliti ditemukan bahwa saat ini, pengelolaan BUMDes di desa Forekmodok masih mengalami beberapa kendala yang menyebabkan BUMDes ini belum berjalan secara baik. Masih sedikit masyarakat atau kelompok tani yang belum memanfaatkan kehadiran BUMDes terbukti dari awal pendirian jumlah anggota berjumlah 51 orang pada tahun 2017 menurun menjadi 30 orang pada tahun 2019 selain itu BUMDes kurang memberikan kontribusi bagi Pendapatan Desa, total kontribusi BUMDes hanya sebesar 0,05 % dari PAD dari 3 unit usaha yang dibentuk belum memberikan kontribusi terhadap pendapatan desa karena diduga adanya kepentingan individu terkait dengan pengelolaan potensi ekonomi dan

kurangnya pemahaman masyarakat dan aparat yang mengelola BUMDes tersebut⁸. Unit usaha belum menggambarkan tentang potensi yang ada sehingga penentuan jenis usaha juga menjadi kendala dimana persepsi masyarakat saling bertolak belakang, hal ini proses perencanaan, pengelolaan dan pengawasan diduga kurang optimal sehingga mengakibatkan BUMDes mengalami macet dan tidak membawa perubahan terhadap peningkatan ekonomi setempat. Peningkatan ekonomi setempat sangat dipengaruhi oleh perkembangan modal usaha Bumdes Wehali, yang dapat dilihat pada gambar berikut ini:

⁸ LPPD Desa Forekmodok Tahun Anggaran .2018

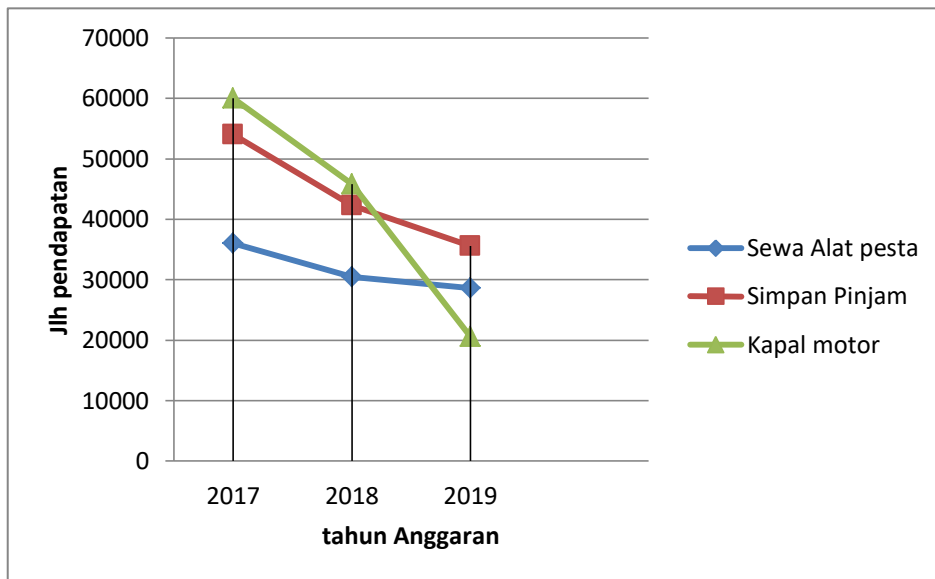
Gambar 1.1
Perkembangan Modal Usaha Bumdes Wehali
Tahun Anggaran 2017 s.d 2019



Dari gambar di atas, terlihat bahwa Perkembangan Modal Usaha Bumdes Wehali Tahun Anggaran 2017 s.d 2019 Data diatas menunjukkan perkembangan Modal usaha BUMDes selama 3 tahun terakhir. Tahun 2017 Bumdes Wehali mendapat kucuran dana dari desa sebesar Rp. 150.000.000,- yang dialokasikan untuk 3 unit usaha yaitu Usaha sewa Alat Pesta sebesar Rp. 36.000.000,-, Usaha Koperasi Simpan Pinjam Rp. 54.000.000 dan Unit usaha bisnis ikan sebesar Rp. 60.000.000,- Selama 3 tahun terakhir dari tahun 2017 s.d 2019 perkembangan Modal mengalami penurunan yang signifikan. Tahun 2017 Modal untuk Unit usaha Sewa alat pesta sebesar Rp. 36.000.000,- menurun pada tahun 2018 menjadi Rp. 32.600.000 dan akhirnya pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi Rp. 28.350.000,-. Untuk Unit Usaha Simpan pinjam 2017 sebesar Rp.

54.000.000 tahun 2018 menjadi Rp. 48.600.000 dan pada tahun 2019 turun sebesar Rp. 30.250.000. Untuk unit Usaha bisnis ikan dan Kapal motor Dari tahun 2017 sebesar Rp. 60.000.000 turun pada tahun 2018 Rp. 43.800.000 dan tahun 2019 menurun drastis sebesar Rp. 16.600.000,- Untuk lebih jelas perkembangan unit usaha BUMDes Wehali dapat dilihat pada gambar grafik berikut ini:

Gambar 1.2
Jumlah Pendapatan unit usaha Bumdes Wehali



Gambar 1.2 menunjukkan perkembangan Pendapatan Bumdes Wehali selama 3 tahun terakhir dari tahun 2017 s.d 2019. Unit usaha Sewa Alat pesta Pendapatan yang diperoleh pada tahun 2017 sebesar Rp. 36.000.000,- menurun pada tahun 2018 Rp. 32.600.000 dan menurun pada tahun 2019 sebesar Rp. 28.350.000. begitulah yang terjadi pada unit usaha lainnya. Untuk unit usaha Kapal motor pada tahun 2017 pendapatan yang diperoleh Rp. 60.000.000, pada tahun 2018 menurun sebesar Rp. 43.800.000 dan pada tahun 2019 mengalami penurunan yang sangat drastis sebesar Rp. 16.600.000,-

Berdasarkan observasi awal ditemukan fakta dan fenomena yang terjadi yaitu pengelolaan Bumdes Wehali Di desa Forekmodok belum secara optimal ditemukan 3 permasalahan utama yaitu 1) keanggotaan Bumdes yang mengalami penurunan pada 3 tahun terakhir. 2) dari unit usaha yang ada saat ini perkembangannya naik turun bahkan unit usaha kapal motor dan pengkapan ikan mengalami kemacetan total. 3) Perkembangan Modal dan pendapatan unit usaha selama 3 tahun yang menurun secara signifikan dimana belum dapat memberikan kontribusi bagi PADes Desa Forekmodok. Dari permasalahan tersebut mendorong peneliti untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam tata kelola BUMDes wehali yang belum secara maksimal. Sehingga penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: ***FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT DALAM TATA KELOLA BUMDES WEHALI DI DESA FOREKMODOK KECAMATAN WELIMAN KABUPATEN MALAKA***

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pengelolaan Bumdes Wehali di desa Forekmodok Kecamatan Weliman Kabupaten Malaka?

1.3 TUJUAN

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam Tata kelola Bumdes Wehali di desa Forekmodok Kecamatan Weliman Kabupaten Malaka .

1.4 MANFAAT PENELITIAN

A. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah desa Forekmodok
- 2) Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan masyarakat Desa dalam pengelolaan BUMDes Forekmodok.
- 3) Sebagai bahan masukan bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan masalah yang sama.
- 4) Sebagai sumbangan pendidikan dalam menambah wawasan tentang pengelolaan BUMDes.